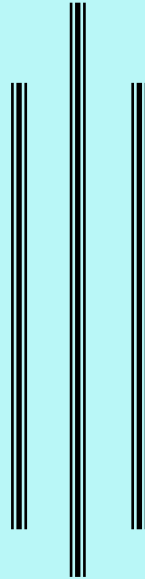




# **LAPORAN KINERJA (LKj)**



**KECAMATAN SILAUT  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN 2025**



## KATA PENGANTAR

Segala puji beserta syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'aala atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dapat kami selesaikan penyusunannya. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 didasarkan atas amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja untuk tahun 2025. Rencana Kinerja Tahun 2025 merupakan sasaran kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2025 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis 2021-2026 Kecamatan Silaut. Sementara itu, capaian kinerja merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan selama tahun 2025 yang memang diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2025. Laporan Kinerja(LKj) ini merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja Kecamatan Silaut kepada para stakeholders selama Tahun 2025. Informasi kinerja yang ada sepenuhnya akan dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Kecamatan Silaut dalam upaya pemenuhan visi dan misinya.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan ini disusun, Terima kasih.

Silaut, 12 Februari 2026  
Camat Silaut,  
  
AELIEN, S.Sos.  
Pembina IV.a  
NIP. 197206051993031005





## ***IKHTISAR EKSEKUTIF***

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance* dikembangkan melalui media pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai dengan Renstra 2021 – 2026 Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, implementasi tugas pokok dan fungsi dengan tujuan strategis “Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi”.

Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021–2026 mendukung dan berperan dalam menjalankan misi pertama dan misi keenam. Misi pertama yaitu “**Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan**” dan misi keenam yaitu “**Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tenteram dan Dinamis**”.

Seiring dengan harapan tersebut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan harus mampu melaksanakan visi pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021- 2026 melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan, Kecamatan. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut, Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Memiliki Tugas Pokok mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai berikut:

**VISI : Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat Didukung Pemerintahan Yang Akuntabel dan Profesional.**

**MISI 1: Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan.**

**TUJUAN 1.1: Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi.**





SASARAN 1.1.1: Terwujudnya Pemerintah Kecamatan yang Akuntabel dan Berkinerja.

SASARAN 1.1.2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.

SASARAN 1.1.3: Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah.

SASARAN 1.1.4: Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari.

**MISI 6: Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tenteram dan Dinamis.**

TUJUAN 6.1: Terciptanya kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tenteram dan Dinamis..

SASARAN 6.1.1: Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.

Tahun 2022 Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Pohon Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 dan melakukan rasionalisasi terhadap RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, seiring dengan itu juga dilakukan penyusunan terhadap pohon kinerja Perangkat Daerah, Cascading dan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, untuk mewujudkan itu semua ditetapkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 yang dapat dilihat target dan capaiannya secara lengkap pada Tabel. 1 berikut:

Tabel 1.1

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis  
Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	A (81,0)	A (80,38)	99.23





Laporan Kinerja (LKj)  
Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan  
Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	87	91,30	104.94
3.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	Nilai	92	92	100
4.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik	%	75%	70%	93.33
		Angka Kemiskinan Ekstrim	%	0%	0%	100
		Prevalensi Stunting (Eppgbm)	%	5%	5,52%	0.90
5.	Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Konflik Yang Diselesaikan	%	82	60	73.17
<b>Rata-rata capaian (%)</b>						81.65

Catatan:\*) Data Capaian Tahun 2025

Sumber: Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2026

Rata-rata Pencapaian Kinerja Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 untuk (lima) Sasaran Strategis dan 7 (tujuh) indikator kinerja sebesar 81.68%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori **Baik**.



Silaut, 12 Januari 2025  
Camat Silaut

AFLIEN, S.Sos.  
Penata Tk. I / III.d

NIP. 197206051993031005



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	.....	<b>i</b>
<b>IKHTISAR EKSKLUSIF</b>	.....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	.....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	.....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	.....	<b>viii</b>
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
	1.1. Latar Belakang .....	1
	1.2. Maksud Tujuan .....	1
	1.3. Gambaran Umum Organisasi .....	2
	1.4. Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama....	5
	1.5. Landasan Hukum .....	6
	1.6. Sistematika Penyusunan .....	7
<b>BAB II</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	<b>9</b>
	2.1. Rencana Strategis Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan .....	9
	2.2. Rencana Kinerja ..	13
	2.3. Perjanjian Kinerja .....	16
<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>19</b>
	3.1. Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja .....	19
	3.2. Hasil Pengukuran Kinerja .....	20
	3.3. Capaian Kinerja .....	22
	3.4. Realisasi Anggaran .....	56
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>62</b>
<b>Lampiran-Lampiran</b>		



## DAFTAR TABEL

Tabel	2.1.	Misi, Tujuan dan Sasaran Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.....	11
Tabel	2.2.	Rencana Kinerja Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.....	13
Tabel	2.3.	Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.....	15
Tabel	2.4.	Perjanjian Kinerja Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.....	16
Tabel	2.5.	Program dan Anggaran Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.....	18
Tabel	3.1.	Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025 .....	20
Tabel	3.2.	Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 .....	20
Tabel	3.3.	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Tahun 2024.....	23
Tabel	3.4.	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	24
Tabel	3.5.	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi .....	25
Tabel	3.6.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	30
Tabel	3.7.	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2025.....	34
Tabel	3.8.	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	35
Tabel	3.9.	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi .....	36
Tabel	3.10.	Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja .....	36
Tabel	3.11.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	37



Tabel	3.12.	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah Tahun 2025.....	39
Tabel	3.13.	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	40
Tabel	3.14.	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	40
Tabel	3.15.	Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja.....	41
Tabel	3.16.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	42
Tabel	3.17.	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari Tahun 2025.....	44
Tabel	3.18.	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	47
Tabel	3.19.	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	48
Tabel	3.20.	Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja.....	49
Tabel	3.21.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	50
Tabel	3.22.	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2025.....	52
Tabel	3.23.	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	53
Tabel	3.24.	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	54
Tabel	3.25.	Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja.....	55
Tabel	3.26.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	55
Tabel	3.27.	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 yang Menunjang Sasaran Strategis....	57



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1	Struktur Organisasi Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.....	4
	3.1	Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025.....	26
	3.2	Pemberian Reward dan Punishment kepada Capaian Kinerja Perangkat Daerah oleh Bapedalitbang Kab. Pesisir Selatan.....	27
	3.4	Dokumen LKj dan Laporan Hasil Evaluasi LKj Tahun 2025.....	27
	3.5	Rapat Evaluasi dan Monitoring Internal Secara Berkala Atas Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025.....	28
	3.6	Hasil Evaluasi LAKIP Tahun 2024.....	30
	3.7	Tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan Silaut Tahun 2024 .....	32
	3.8	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2025 .....	34
	3.9	Laporan Inovasi daerah 2024 .....	39
	3.10	SK Bupati Pemberitahuan Data P3KE 2024.....	46



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 didasarkan atas amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan memuat realisasi kinerja Pemerintah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 merupakan perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

#### 1.2. Maksud Tujuan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah bentuk pertanggungjawaban tahunan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan stakeholder atas pencapaian visi, misi tujuan dan sasara yang diamanatkan kepada Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berisikan informasi terkait dengan keberhasilan, kegagalan hambatan dan solusi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan. Informasi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar dalam penyempurnaan dokumen perencanaan dimasa yang akan datang, baik penyempurnaan



penetapan sasaran dan target kinerja, maupun penyempurnaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk kebijakan yang diperlukan.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kerjanya.

### **1.3. Gambaran Umum Organisasi**

Kecamatan Silaut terbentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan, Kecamatan adalah perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat nagari.

Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Camat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;





- f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan nagari; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:

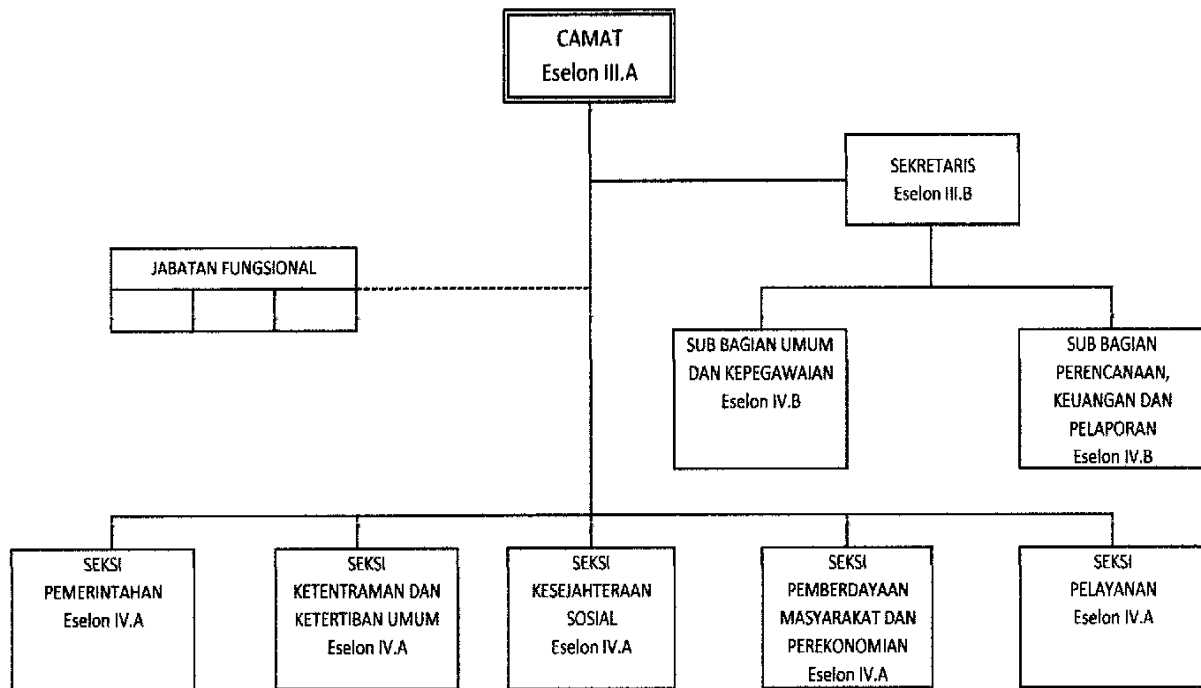
- a. Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian, terdiri dari:
  - (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - (2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- b. Seksi Pemerintahan;
- c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- d. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian;
- f. Seksi Pelayanan;
- g. Jabatan Fungsional.





LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 40 TAHUN 2017  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN  
TUGAS DAN TATA KERJA KECAMATAN DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
PESISIR SELATAN

### STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



#### 1.4. Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama

Kecamatan adalah perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat nagari.

Dalam melaksanakan tugasnya, Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, dan Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horisontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing – masing.

Harmonisasi dan koordinasi tugas camat dengan pemerintah nagari dalam bentuk fasilitasi, rekomendasi maupun koordinasi, diantaranya menyusun peraturan desa/nagari, administrasi tata kelola pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan pendayagunaan asset, sinkronisasi pembangunan daerah dengan pembangunan desa, penetapan lokasi kawasan pembangunan pedesaan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dan lain sebagainya.

##### **Permasalahan Utama**

###### **Identifikasi permasalahan**

Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat nagari.

###### **Hambatan/kendala**

Terdapat beberapa masalah pokok yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan saat ini, antara lain:

1. Keterbatasan anggaran dan adanya evisiensi Program dan Kegiatan yang tidak dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Silaut.





2. Kurangnya pemahaman terhadap tugas dan fungsi yang lebih luas oleh ASN sehingga kurangnya inovasi dan hanya bekerja rutinitas saja.
3. Masih kurangnya Sarana dan Prasarana yang ada di Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan. Peningkatan mutu pelayanan Kecamatan Silaut kabupaten Pesisir Selatan perlu disikapi dengan meningkatkan sarana dan prasarana, karena sarana dan prasarana yang ada saat ini belum memadai.

### **Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu-isu strategis dalam peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat nagari adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya jumlah SDM bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, perlu penambahan jumlah tenaga bidang Pemberdayaan Pemerintah dengan tujuan dapat melaksanakan peningkatan pemberdayaan masyarakat nagari.

4. Masih belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam pelayanan di Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan masih belum dapat dilaksanakan secara maksimal dan menyeluruh karena tidak adanya Diklat, BIMTEK dan lainnya.

### **Peningkatan Sistem AKIP dan Peningkatan Kinerja**

Demi meningkatkan kinerja pada Kecamatan Silaut dengan melakukan monitoring dan evaluasi APBD secara berkala yang langsung dipimpin oleh Camat untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan setiap bulannya atau minimal setiap tiga bulan.

Di samping itu, upaya lainnya adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja yang terdapat pada perjanjian kinerja minimal setiap enam bulan.





### 1.5. Landasan Hukum

Adapun dasar hukum yang mendasari kegiatan meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Nagari adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2025 tentang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 127 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Silaut Tahun 2021-2026;





## **5. Sistematika Penyusunan**

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai Latar Belakang, Maksud Tujuan, Gambaran Umum Organisasi, Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama, Landasan Hukum dan Sistematika Penyusunan.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA**

Pada bab ini menjelaskan mengenai Rencana Strategis, Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bab ini menjelaskan mengenai Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja, Hasil Pengukuran Kinerja, Capaian Kinerja Pemerintah dan Realisasi Anggaran.

### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk peningkatan kinerja.





## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 Pelaksanaan kegiatan Kecamatan Silaut tahun 2025 ini dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan.

#### 2.1. RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SILAUT KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026

Rencana Pembangunan Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.

Renstra Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

##### 2.1.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dan merupakan lanjutan dari periode pembangunan lima tahun sebelumnya.





Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021. Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026 adalah:

**“MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERMARTABAT, DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL”**

### 2.1.2. Misi

Misi pembangunan 2021-2026 adalah rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026, yaitu Mewujudkan Pesisir Selatan lebih sejahtera, maju, dan bermartabat didukung pemerintahan yang akuntabel dan profesional. Misi pembangunan 2021-2026 diarahkan untuk meletakkan fondasi kokoh bagi pembangunan Pesisir Selatan ke depan yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan fundamental perekonomian daerah. Usaha-usaha perwujudan visi 2025 dijabarkan dalam misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 sebagai berikut.

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.



## Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan Kecamatan Silaut telah ditetapkan misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Hubungan antara Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.1.**  
**Misi, Tujuan dan Sasaran Kecamatan Silaut**  
**Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026**

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja Pada Tahun Ke-				
						2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi.	Indek Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Pemerintah Kecamatan yang Akuntabel dan Berkinerja.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB (70)	A (80.43)	A (81,0)	A (81,0)	A (81,0)
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	80	82	85	85	85
			Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	Nilai	80	75	75	85	85
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik	%	70%	70%	75%	75%	75%
			Angka Kemiskinan Ekstrim		%	-	-	0%	0%	0%
			Prevalensi Stunting (Eppgbm)		%	-	-	5,20%	5,20%	5,20%





Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tenteram dan Dinamis.	Terciptanya kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tenteram dan Dinamis.	Indeks Kebahagiaan Masyarakat	Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Konflik Yang Diselesaikan	%	80%	80%	80%	80%	80%
--	---	-------------------------------	--	--------------------------------------	---	-----	-----	-----	-----	-----

Sumber: Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Pencapaian tujuan dan sasaran di atas sangatlah tergantung pada prioritas pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya disektor Pelayanan.

Tujuan pengembangan dan pembinaan Kecamatan Silaut dalam rangka menciptakan program pembangunan dan pelaksanaan pelayanan masyarakat yang optimal, adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada sehingga dapat berguna sebagaimana yang diharapkan demi kesejahteraan masyarakat.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan pembangunan Kecamatan baik dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan.
3. Mendorong peran aktif Pemerintahan Nagari untuk mengajak masyarakat supaya lebih giat dalam meningkatkan penghasilan ekonomi masyarakat dan untuk mengurangi angka kemiskinan.
4. Meningkatkan potensi Sumber Daya Manusia (angkatan kerja) dan fasilitas penunjangnya dalam upaya mengurangi angka pengangguran.
5. Sebagai ujung tombak program pemerintah baik dalam bentuk pelaksanaan pembangunan (fisik, sarana-prasarana) maupun dalam pengentasan angka kemiskinan dan pengangguran.
6. Memberdayakan Masyarakat akan sadar dengan pentingnya lingkungan yang sehat bersih dan menghasilkan.

Sasaran untuk mewujudkan tujuan yang tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk mencapai pelayanan masyarakat yang optimal.



2. Meningkatkan upaya aparatur yang professional dan handal melalui pengembangan SDM (malalui Diklat-diklat).
3. Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan.
4. Mendorong terwujudnya pengembangan ekonomi berbasis kawasan.
5. Melaksanakan berbagai musyawarah perencanaan pembangunan baik ditingkat Kampung sampai ke tingkat Kecamatan.
6. Meningkatkan sarana-prasarana petugas dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efesiensi kerja.
7. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Masyarakat dan aspek pengetahuan dan keterampilannya untuk peningkatan kesejahteraan.
8. Menciptakan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja dengan cara melakukan pelatihan keterampilan dengan menjalin kerjasama lintas sektor SKPD dan program Pemerintah Pusat seperti PNPM-MP.
9. Mendorong Masyarakat agar dapat kreatif dalam memanfaatkan lahan yang ada agar dapat produktif dan berdaya guna dalam peningkatan ekonomi kreatif yang bernilai guna.

Untuk mencapai sasaran maka ditetapkan strategi yang berisikan kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Kebijakan, program dan kegiatan Tahun 2024 pada Kecamatan Silaut dapat dilakukan dengan menetapkan rencana strategis Tahun 2024 yang berisikan target kinerja, sasaran dan kegiatan dapat dilihat pada Pengukuran Kinerja PD.

## 2.2. RENCANA KINERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Rencana Kinerja Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dapat terlihat dari tabel sebagai berikut:



Tabel 2.2.

Rencana Kinerja Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi.	Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	A (81,0)
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	87
		Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	Nilai	92
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik	%	75%
			Angka Kemiskinan Ekstrim	%	0%
			Prevalensi Stunting (Eppgbm)	%	5%
5.	Terciptanya kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tenteram dan Dinamis.	Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Konflik Yang Diselesaikan	%	82%

Sumber: Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Untuk menentukan target kinerja yang efektif, menggunakan fitur atau metode **SMART** (Specific, Measurable, Attainable, Relevant dan Time-bound atau spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu). Karena fitur atau metode **SMART** ini merupakan metode yang paling efektif untuk menentukan target dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi target yang ingin dicapai dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. **Analisis Situasi:** Pahami kondisi saat ini dari Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir



- Selatan, termasuk sumber daya yang ada, tantangan, dan peluang.
2. **Penetapan Tujuan:** Tentukan Tujuan yang jelas untuk Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan yang akan membimbing penetapan target.
  3. **Tujuan Strategis:** Tetapkan tujuan strategis yang ingin dicapai dalam jangka panjang.
  4. **Indikator Kinerja:** Kembangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian terhadap tujuan - tujuan tersebut.
  5. **Target Spesifik:** Tetapkan target spesifik untuk setiap IKU yang telah ditentukan.
  6. **Rencana Aksi:** Buat rencana aksi terperinci dengan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai target tersebut.
  7. **Monitoring dan Evaluasi:** Lakukan monitoring secara berkala dan evaluasi pencapaian target, serta lakukan penyesuaian jika diperlukan.

Adapun Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama satu tahun Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.3**  
Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formula	2025
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(9)
1.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi	Indek Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi AKIP PD oleh Inspektorat Daerah Kab. Pessel	A(81,0)
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	87
			Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	Nilai Hasil Kematangan Inovasi Kecamatan dari aplikasi iga2022.silaut.kebuapaten.pesisir.selatan	92
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	Persentase Pemerintahan Nagari Yang Memiliki Administrasi Dan Kinerja Baik	$\frac{\sum \text{Nagari yang Memiliki Administrasi dan Kinerja baik}}{\sum \text{Seluruh Nagari}} \times 100\%$	75%





				Angka Kemiskinan Ekstrem	Data Miskin dan Rentan Miskin ditetapkan melalui Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 050/360/Kpts/BPT-PS/2024 Tentang Penetapan Data Penduduk Miskin dan Rentan Miskin Pemasaran Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.	0%
				Prevalensi Stunting (Eppgbm)	$\frac{\sum \text{Balita stunting}}{\sum \text{Balita yang diukur}} \times 100\%$	5%
2.	Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman Tenram dan Dinamis	Indeks Kebahagiaan masyarakat	Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat	Persentase konflik yang diselesaikan	$\frac{\sum \text{Konflik yang diselesaikan}}{\sum \text{Seluruh Konflik yang dilaporkan}} \times 100\%$	82%

Sumber: Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2026

### 2.3. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan suatu dokumen kontrak kinerja antara Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dengan Bupati Pesisir Selatan untuk mewujudkan target kinerja Tahun 2025 berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Silaut. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan. Pada dasarnya perjanjian kinerja Tahun 2025 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan selama Tahun 2025. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2025 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian tujuan.

Dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Silaut Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 disusun setelah diterimanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Pada Tahun 2025, dilakukan mekanisme pergeseran anggaran sehingga anggaran yang tidak terserap pada beberapa kegiatan dapat dialihkan dan dimaksimalkan untuk mendukung terlaksananya kegiatan yang lain. Pergeseran Anggaran tercantum dalam dokumen Pergeseran Anggaran. Adapun Perjanjian Kinerja (PK) perubahan Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 sebagai berikut:



Tabel 2.4.  
Perjanjian Kinerja Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(5)
1.	Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (81,0)
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87
3.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	92
4.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik	75%
		Angka Kemiskinan Ekstrim	0%
		Prevalensi Stunting (Eppgbm)	5%
5.	Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Konflik Yang Diselesaikan	82%

Sumber: Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2026, diolah

Dilihat dari Tabel 2.4 di atas, terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja dari 5 (lima) sasaran strategis yang ditetapkan Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

- a. Nilai AKIP Perangkat Daerah, target dihitung berdasarkan hasil penilaian laporan akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Silaut oleh Tim Penilai Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), target dihitung berdasarkan hasil penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan publik di Kecamatan Silaut Tahun 2025;
- c. Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan, target dihitung berdasarkan hasil penilaian saat pengentrian kriteria inovasi pada aplikasi IGA; dan





- d. Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik, target dihitung berdasarkan jumlah Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik dibagi Jumlah Seluruh Nagari dikali 100;
- e. Angka Kemiskinan Ekstrim, target dihitung berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data P3KE yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 050/436/Kpts/BPTPS/2023 Tentang Penetapan Data Penduduk Miskin Ekstrem Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023-2024;
- f. Prevalensi Stunting (Eppgbm), target dihitung berdasarkan jumlah Balita Stunting dibagi Jumlah Balita yang diukur dikali 100, data diambil dari Puskesmas Tanjung Makmur Kecamatan Silaut;
- g. Persentase Konflik Yang Diselesaikan, target dihitung berdasarkan jumlah konflik yang diselesaikan dibagi Jumlah konflik yang dilaporkan.

Berikut Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut.

Tabel 2.5.

Program dan Anggaran Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

No	Program	Anggaran	
		Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.988.903.643	1.951.772.670
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	9.300.000	6.050.000
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	72.183.500	48.605.000
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.555.000	5.085.000
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	37.130.000	31.950.000
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	10.615.000	5.800.000
	<b>J U M L A H</b>	<b>2.123.687.143</b>	<b>2.049.262.670</b>

Sumber: DPA-SKPD Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, 2025





### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya, dan analisis akuntabilitas keuangan.

Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan, baik keberhasilan- keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2024.

### **3.1. METODOLOGI PENILAIAN CAPAIAN TARGET KINERJA**

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan.



Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan capaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada Tabel 3.1. dibawah ini :

Tabel 3.1  
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan  
Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	<53%	Kurang Baik

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

### 3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja utama 5 (lima) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2  
Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Kecamatan Silaut  
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA 2025		
				TARGET	REALISASI	(%)
<b>MISI 1 : MEMPERKUAT TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIF DAN TRANSPARAN.</b>						
<b>Tujuan 1.1 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi.</b>						
1.1.1	Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan yang Akuntabel dan Berkinerja	1. Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	A (81.0)	A (80.38)	99.23
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	87	91.30	104.94





	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	3.	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	Nilai	92	92	100
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	4.	Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik	%	75%	70%	93.33
		5.	Angka Kemiskinan Ekstrim	%	0%	0%	100
		6.	Prevalensi Stunting (Eppgbm)	%	5%	5.52%	1.10
<b>MISI 6 : MEWUJUDKAN KONDISI MASYARAKAT YANG AMAN, TENTERAM DAN DINAMIS.</b>							
<b>Tujuan 6.1 : Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan Yang Aman, Tenteram Dan Dinamis.</b>							
6.1.1	Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat	7.	Persentase Konflik Yang Diselesaikan	%	80%	60%	73.17
<b>Rata-rata Capaian Indikator 5 Sasaran Strategis : 7 Indikator Kinerja</b>							81.68

Catatan :\*) Data Capaian Tahun 2025

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2026

Dari Tabel 3.2 diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2025 ini ada 7 (tujuh) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 yaitu :

1) Nilai AKIP Perangkat Daerah dengan target A (81.0).

Capaian indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah adalah A (80.38) dengan capaian kinerja sebesar 99,23% dengan predikat **sangat baik**, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan ini memakai nilai evaluasi Tahun 2024 dikarenakan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 diperoleh dari nilai evaluasi laporan kinerja Tahun 2025 yang nilai ini baru bisa diperoleh sekitar pada bulan Maret Tahun 2026.

2) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target 87.

Capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Silaut adalah 91.30 atau sebesar 104,94% dengan predikat **sangat baik**.

3) Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan dengan target 92%.





Capaian indikator Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan Silaut adalah 92% atau sebesar 100% dengan predikat **sangat baik**.

- 4) Nilai Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik dengan target 75%.

Capaian indikator Nilai Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik adalah 70% atau sebesar 93.33% dengan predikat **sangat baik**.

- 5) Nilai Angka Kemiskinan Ekstrim dengan target 0%.

Capaian indikator Nilai Nilai Angka Kemiskinan Ekstrim adalah 0% atau sebesar 100% dengan predikat **sangat baik**.

- 6) Nilai Prevalensi Stunting (Eppgbm) dengan target 5%.

Capaian indikator Nilai Nilai Prevalensi Stunting (Eppgbm) adalah 5.25% atau sebesar 1.10% dengan predikat **kurang baik**.

- 7) Nilai Persentase Konflik Yang Diselesaikan dengan target 82%.

Capaian indikator Nilai Persentase Konflik Yang Diselesaikan adalah 60% atau sebesar 73.17% dengan predikat **baik**.

Capaian rata-rata ke 7 (tujuh) indicator kinerja tersebut diatas adalah sebesar 81.68% dengan predikat **baik**.

### 3.3. CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada Tabel 3.2 diatas, selanjutnya pada sub bab ini disajikan uraian pencapaian tujuan, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja persasaran strategis untuk mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

#### SASARAN STRATEGIS 1

#### Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai AKIP Perangkat Daerah.



**a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.3 dibawah ini:

Tabel 3.3  
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja  
Sasaran Strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja  
Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	A (81.0)	A (80.38)	99.23
<b>Rata-rata capaian (%)</b>						<b>99.43</b>

Catatan:\*)Data Capaian Tahun 2024

Sumber: Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2026

Dari Tabel 3.3 di atas dapat dilihat bahwa Nilai AKIP Perangkat Daerah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 masih menggunakan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dikarenakan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 belum tersedia. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 diperoleh dari hasil evaluasi terhadap Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

**b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.**

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.4 dibawah ini :



**Tabel 3.4**

Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja  
Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	A (80,43)	A (81,0)	A (81,0)	A (80,54)	A (80,38)	A (80,38)	100%	99.23%	99.23%

Catatan:\*)Data Capaian Tahun 2023

Sumber: Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari tabel 3.4 menggambarkan bahwa peningkatan nilai Evaluasi LKj Kecamatan Silaut pada komponen perencanaan kinerja tahun 2023-2025 adalah dari segi realisasinya nilai nilai Evaluasi LKj Kecamatan Silaut pada komponen perencanaan kinerja ini mengalami penurunan yaitu dari nilai 80,54 pada tahun 2023 turun menjadi 80,38 pada tahun 2024.

**c. Membandingkan Realisasi Indikator Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.**

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.5 dibawah ini:

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target  
Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (80,38)	A (81,0)	99,23	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

Catatan:\*)Data Capaian Tahun 2024

Sumber: Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2026





**d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional.**

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dengan provinsi dan nasional, tidak dapat dibandingkan karena merupakan target spesifik pada Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

**e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.**

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

**1. Perencanaan Kinerja**

Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan telah membuat dan menyusun dokumen perencanaan kinerja yang terdiri atas:

- a) Perencanaan Kinerja Jangka Menengah, yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan Indikator Kinerja Utama (IKU);
  - b) Perencanaan Kinerja Tahunan, yaitu Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK);
  - c) Perencanaan aktivitas pendukung kinerja, yaitu Rencana Aksi (Renaksi); dan
  - d) Perencanaan Anggaran, yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- Semua dokumen perencanaan kinerja ini sudah disusun dan diupload pada website Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan yaitu <https://silautkec.pesisirselatankab.go.id/>





Gambar 3.1 : Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025

## 2. Pengukuran Kinerja

Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan sudah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis operasional organisasi. Pimpinan pada setiap level jabatan telah terlibat sebagai pengambil keputusan (decision maker) untuk mengukur dan melakukan pemantauan terhadap capaian kinerja bawahannya. Pengukuran kinerja belum dimanfaatkan dalam pemberian **reward** dan **punishment**. Kecamatan Silaut selama Tahun 2025 belum memberikan **reward** dan **punishment** terhadap capaian kinerja bawahan.

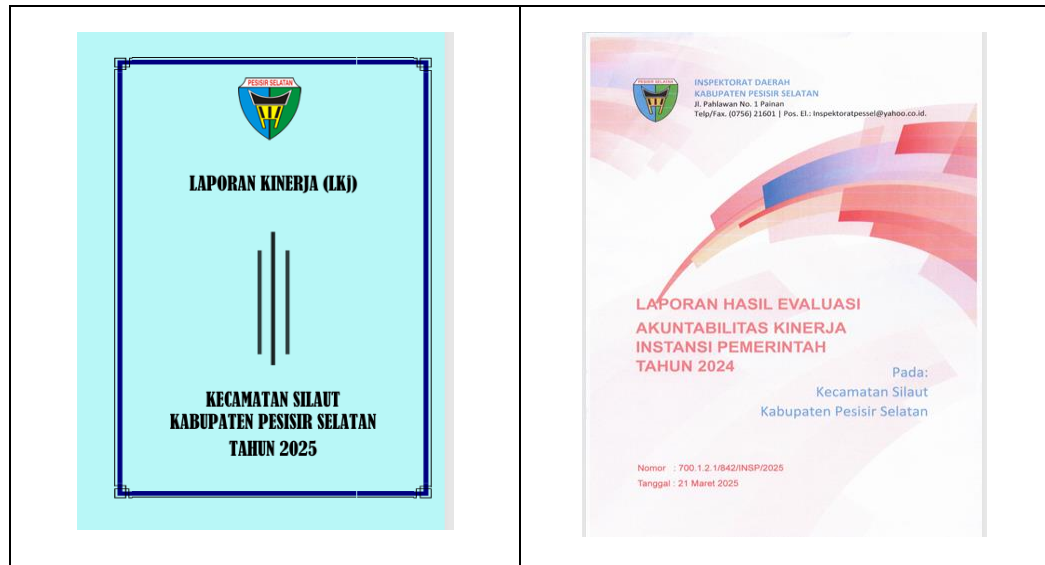
## 3. Pelaporan Kinerja

Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan sudah menyusun Laporan Kinerja (LKj) yang mana terlebih dahulu dilakukan asistensi penyusunan laporan kinerja dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Setelah laporan kinerja disusun yang sesuai dengan sistematika penyusunan laporan kinerja, kemudian disampaikan ke Bagian Organisasi sebagai bahan bagian dalam





penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah, selanjutnya laporan kinerja dilakukan reviu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.



Gambar3.4: Dokumen LKj 2025 dan Laporan Hasi Evaluasi LKj Tahun 2024

#### 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan sudah melakukan pemantauan capaian kinerja secara periodik melalui rapat-rapat monitoring dan evaluasi. Dokumentasi pelaksanaan rapat-rapat monitoring dan evaluasi dapat dilihat seperti Gambar 3.4 dibawah ini :



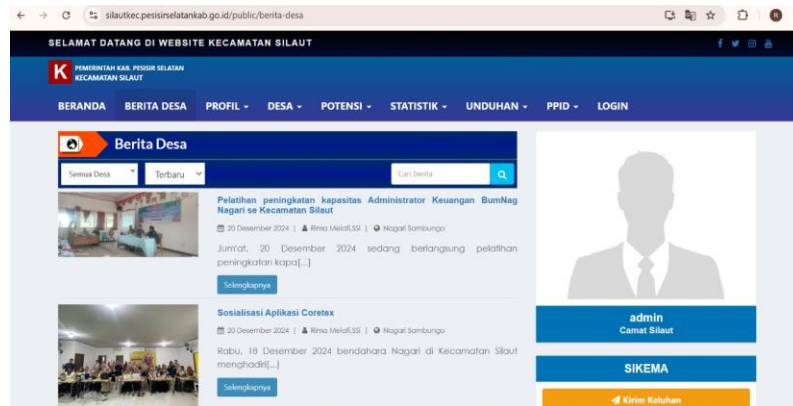
Gambar3.5: Rapat Evaluasi dan Monitoring Internal Secara Berkala Atas Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025.





Semua pelaksanaan kegiatan Kecamatan Silaut Kabupaten selama Tahun 2025 dilakukan publikasi pada media sosial yang dimiliki oleh Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

1. Website Kecamatan Silaut : <https://silautkec.pesisirselatankab.go.id/>



2. Facebook :



Kecamatansilaut15



3. Instagram



Dengan memanfaatkan semua sarana publikasi yang ada terutama website dan media sosial untuk publikasi kegiatan selama Tahun 2025.

**f. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.6

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp.)			Tingkat Efisiensi Sumber Daya(%)
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (81.0)	A (80.38)	99.23	1.951.772.670	1.886.880.048	96,68	3,78

Catatan :\*)Data Capaian Tahun 2023

Sumber :Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2026

Perhitungan Tingkat Efisiensi sumber daya diperoleh dari rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 1 - \left\{ \frac{\text{realisasi anggaran / rata-rata realisasi kinerja}}{\text{jumlah anggaran / rata-rata target kinerja}} \right\} \times 100\%$$

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya sebesar 3,78%.

Target Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Silaut Tahun 2025 adalah A (81.0), dan untuk realisasinya menggunakan data hasil evaluasi Nilai AKIP Kecamatan Silaut Tahun 2024 sebesar A (80,38) serta untuk capaian kinerja sebesar 99,23%. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 0,16% apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 sebesar A(80,54).



HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA  
KECAMATAN SILAUT  
TAHUN 2024

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30,00	25,73	25,73
2	Pengukuran Kinerja	30,00	20,12	19,98
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,19	12,05
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	22,50	22,63
Nilai Akuntabilitas Kinerja			80,54	80,38
			A	A

Gambar3.6: Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024

Terhadap hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah (OPD) direkomendasikan sebagai berikut:

No	Rekomendasi
1.	<b>Perencanaan Kinerja</b>
	a. Menjadikan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar perencanaan kinerja yang berkelanjutan dan tidak sering diganti selama periode Renstra sehingga capaian kinerja dapat tercapai dengan baik.
	b. Dalam menetapkan target kinerja tahun berjalan agar memperhatikan capaian kinerja tahun sebelumnya. target kinerja tahun berikutnya tidak boleh lebih rendah dari capaian kinerja sebelumnya.
2.	<b>Pengukuran Kinerja</b>
	Menjadikan Pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penyesuaian tunjangan kinerja/ penghasilan, penempatan/ penghapusan jabatan struktural maupun fungsional sebagai penyesuaian aktifitas, penyesuaian anggaran dan efisiensi dalam mencapai kinerja
3.	<b>Pelaporan Kinerja</b>
	Memanfaatkan Laporan Kinerja sebagai evaluasi dalam perubahan budaya kerja organisasi.
4.	<b>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</b>
	Memanfaatkan hasil evaluasi SAKIP dengan meningkatkan implementasinya untuk perbaikan kinerja, efektivitas dan efisiensi kinerja Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan sehingga Nilai SAKIP tahun berikutnya lebih baik dari tahun sebelumnya.



Dari rekomendasi atas evaluasi laporan kinerja tersebut sudah ditindaklanjuti dengan membuat matriks tindak lanjut yang kemudian disampaikan ke Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan seperti tampilan gambar dibawah ini :

**MATRIKS TINDAK LANJUT REKOMENDASI LAPORAN HASIL EVALUASI  
KECAMATAN SILAUT**

NO.	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNGJAWAB	STATUS/ PROGRES	KOORDINATOR	EVIDEN
<b>1. PENGUJIAN ATAS KELENGKAPAN DOKUMEN PENDUKUNG PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA (LKj)</b>								
	Agar melengkapi LKj dengan dokumen data dukung (sumber data) capaian kinerja:							
1.	Data dukung terkait indikator kinerja Persentase Nagari yang Memiliki Kinerja Baik;	1. Telah dilengkapi data dukung terkait.	1 (satu) laporan	2 (dua) hari	Camat Silaut	Telah Selesai	Sekretaris Kecamatan	ada
2.	Data dukung terkait indikator kinerja angka kemiskinan Ekstrim	2. Telah dilengkapi data dukung terkait.	1 (satu) laporan	2 (dua) hari	Camat Silaut	Telah Selesai	Sekretaris Kecamatan	ada
3.	Data dukung terkait indikator kinerja persentase konflik yang diselesaikan	3. Telah dilengkapi data dukung terkait.	1 (satu) laporan	2 (dua) hari	Camat Silaut	Telah Selesai	Sekretaris Kecamatan	ada
<b>3. PENGUJIAN ATAS KESESUAIAN TUJUAN SASARAN PADA LKj OPD DENGAN RENSTRA DAN PK TAHUN 2024</b>								
	Agar dalam menetapkan sasaran dan indikator kinerja pada dokumen perjanjian kinerja agar mengacu dan menyelaraskannya dengan sasaran dan indikator sasaran yang dimuat di dalam dokumen Renstra.	Dilakukan rasionalisasi Renstra 2021-2026 Kecamatan Silaut	Berita Acara Rasionalisasi Renstra	1 (satu) Tahun	Camat Silaut	Proses	Sekretaris Kecamatan	-
<b>4. PENGUJIAN ATAS KESESUAIAN TARGET KINERJA PADA LKj DENGAN TARGET PADA PK DAN RENSTRA TAHUN 2024</b>								
	Agar dalam membuat target dan indikator kinerja pada dokumen PK mengacu dan menyelaraskannya dengan target dan indikator sasaran yang ada di dalam dokumen Renstra.	Dilakukan rasionalisasi Renstra 2021-2026 Kecamatan Silaut	Berita Acara Rasionalisasi Renstra	1 (satu) Tahun	Camat Silaut	Proses	Sekretaris Kecamatan	-
<b>5. PENGUJIAN ATAS KESESUAIAN CAPAIAN KINERJA DENGAN DATA KINERJA SECARA RINCI/ANALISA YANG MEMADAI DALAM LKj</b>								
1.	Agar melengkapi LKj dengan menyajikan informasi sumber data pendukung atas realisasi kinerja untuk seluruh indikator kinerja, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Nagari yang Memiliki Administrasi Baik</li> <li>Angka Kemiskinan Ekstrim</li> <li>Persentase Konflik yang Diselesaikan</li> </ul>	1. Telah dilengkapi semua data dukung atas realisasi kinerja.	1 (satu) laporan	2 (dua) hari	Camat Silaut	Telah Selesai	Sekretaris Kecamatan	ada
2.	Agar pada dokumen IKU menyajikan formulasi perhitungan realisasi kinerja untuk indikator kinerja "angka kemiskinan ekstrim".	2. Telah disajikan formulasi perhitungan realisasi kinerja untuk indikator kinerja "angka kemiskinan ekstrim".	1 (satu) laporan	2 (dua) hari	Camat Silaut	Telah Selesai	Sekretaris Kecamatan	ada

*Gambar3.7: Tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan Silaut Tahun 2025*

**g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.**

Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :





- i. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan terdiri dari :
    1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Silaut Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 1.886.880.048,00 atau 96,68% dari total anggaran sebesar Rp.1.951.772.670,00, sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 3,32%.

## SASARAN STRATEGIS 2

### Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

#### a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.7 dibawah ini:

Tabel 3.7  
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja  
Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	87	91.30	104.94
<b>Rata-rata capaian (%)</b>						<b>104.94</b>

Sumber: Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat 2025



Dari Tabel 3.7 diatas dapat dilihat realisasi capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Silaut mencapai 91,30 dari target 87,00 atau tingkat capaiannya mencapai 104,94%.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan hasil survey kepuasan masyarakat mengenai pelayanan publik pada unit penyelenggaraan layanan publik di lingkungan Kecamatan Silaut. Dimana tujuan dari survei ini adalah untuk mengukur kualitas pelayanan publik dan sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan tindak lanjut untuk peningkatan pelayanan publik.

#### 2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat Per Jenis Layanan

No.	Jenis Layanan	Jumlah Responden	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Kompetensi	Perilaku	Aduan	Sarpras	IKM Per Jenis Layanan
1.	Pelayanan BPJS	50	92,5	93	89,5	96	91	91,5	91	91,5	84,5	91,28
2.	Guru Keterangan	55	91,36	88,03	89,09	94,09	91,36	89,55	89,55	89,55	85,91	89,83
3.	Dispensasi Nikah	46	93,48	92,75	89,67	95,65	92,39	94,57	91,85	95,11	89,67	92,79
Rerata IKM Per Unsur			92,45	91,26	89,42	95,25	91,58	91,87	90,80	92,05	86,69	91,30
IKM Unit Layanan			91,30									
Mutu Unit Layanan			A									

Gambar 3.8: Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2025

#### b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.8 dibawah ini :

**Tabel 3.8** Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82	85	87	82,55	85,25	91,30	100%	100,29%	104,94%

Sumber: Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2026



Dari Tabel 3.8 diatas dapat dilihat bahwa realisasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 6,05% dari 85,25 pada Tahun 2024 menjadi 91,30 pada Tahun 2025.

**c. Membandingkan Realisasi Indikator Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.**

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.9 dibawah ini:

Tabel 3.9  
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target  
Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91,30	87	104.94%	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

Sumber: Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2026

**d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional.**

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dengan provinsi dan nasional, tidak dapat dibandingkan karena merupakan target spesifik pada Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

**e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.**

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja nilai Nilai Indeks



Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.10 dibawah ini :

Tabel 3.10  
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	87	91.30	104.94	Tercapainya nilai unsur pelayanan dengan dikarenakan sarana dan prasarana yang belum lengkap sehingga pelayanan kepada masyarakat optimal.	Meningkatkan sarana dan prasarana seperti: Menyediakan spanduk standar pelayanan dan menyediakan sarana bermain anak.

Sumber :Perencanaan dan Pelaporan Tahun2026

**f. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.11  
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp.)			Tingkat Efisiensi Sumber Daya(%)
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87	91.30	104.94	6.050.000	5.674.500	93.79	10.62%

Sumber: Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2026





Perhitungan Tingkat Efisiensi sumber daya diperoleh dari rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 1 - \left\{ \frac{\text{realisasi anggaran / rata-rata realisasi kinerja}}{\text{jumlah anggaran / rata-rata target kinerja}} \right\} \times 100\%$$

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber dayasebesar 10.62%.

Upaya peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun berikutnya adalah :

1. Menyediakan sarana dan prasarana ruang bermain anak;
2. Menyediakan spanduk standar pelayanan.

**g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.**

Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

- l. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, Kegiatan terdiri dari :
  1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, Sub Kegiatan :
    - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan;

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah sebesar Rp.5.674.500,00 atau 93,79% dari total anggaran sebesar Rp. 6.050.000,00, sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 6,21%.



### SASARAN STRATEGIS 3

#### Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan Silaut.

#### a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.7 dibawah ini:

**Tabel 3.12**

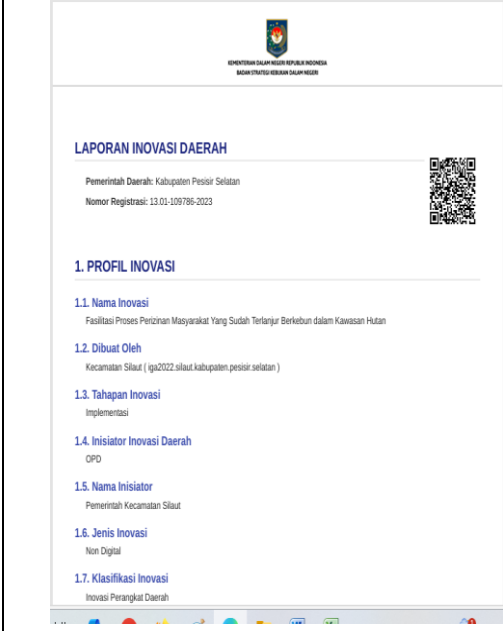
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja  
Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah Tahun 2025

No	Sasaran	IndikatorKinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	Nilai	92	92	100
<b>Rata-ratacapaian(%)</b>						<b>100</b>

Sumber: Laporan Inovasi daerah 2024

Dari Tabel 3.7 Dari Tabel 3.7 diatas dapat dilihat realisasi capaian Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan Silaut mencapai 92,00 dari target 92,00 atau tingkat capaiannya mencapai 100,00%. Inovasi yang divalidasi dan disetujui (approve) serta dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri yaitu “Fasilitasi Proses Perizinan Masyarakat Yang Sudah Terlanjur Berkebun dalam Kawasan Hutan” dengan predikat **tinggi** yang sudah tahap implementasi sejak Tahun 2023. Inovasi ini membantu memfasilitasi masyarakat yang telah terlanjur berkegiatan ekonomi di dalam kawasan Hutan yang dahulunya ilegal atau tidak resmi menjadi Legal atau resmi.



	<p><b>1.21. Kematangan</b> 92,00</p> <p><b>2. INDIKATOR INOVASI</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Indikator SID</th> <th>Informasi</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Regulasi Inovasi Daerah</td> <td>SK Kepala Daerah atau Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah</td> <td>Lebih dari 30</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Dukungan Anggaran</td> <td>Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Indikator SID	Informasi	B	1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah atau Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah		2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30		3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	
No.	Indikator SID	Informasi	B														
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah atau Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah															
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30															
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2															

Gambar 3.8: Laporan Inovasi daerah 2024

**b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.**

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.8 dibawah ini :

**Tabel 3.13**  
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja  
Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1.	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	Nilai	75	75	92	85	87	92	113%	116%	100 %

Sumber: Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2026

Dari Tabel 3.8 diatas dapat dilihat bahwa realisasi Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 5% dari 87,00 pada Tahun 2024 menjadi 92,00 pada Tahun 2025.



**c. Membandingkan Realisasi Indikator Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.**

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.9 dibawah ini:

Tabel 3.14  
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target  
Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	92	92	100%	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

Sumber: Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2026

**d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional.**

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dengan provinsi dan nasional, tidak dapat dibandingkan karena merupakan target spesifik pada Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

**e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.**

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja nilai Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.10 dibawah ini :



Tabel 3.15

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	Nilai	75	87	116	Tercapainya nilai kematangan inovasi Kecamatan Silaut dikarenakan masih bersifat manual/konvensional, belum terintegrasi, pemanfaatan inovasinya terfokus pada kelompok tertentu/tidak umum serta tidak adanya replikasi oleh daerah lain.	Meningkatkan nilai kematangan inovasi dengan cara meningkatkan kualitas inovasi dari tahun sebelumnya melalui inovasi yang bersifat digital, terintegrasi, bersifat umum dan adanya replikasi oleh Daerah lain.

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2026

**f. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.16

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp.)			Tingkat Efisiensi Sumber Daya (%)
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	92	92	100	6.050.000	5.674.500	35.53	6.2

Sumber: Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2026



Perhitungan Tingkat Efisiensi sumber daya diperoleh dari rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 1 - \left\{ \frac{\text{realisasi anggaran / rata-rata realisasi kinerja}}{\text{jumlah anggaran / rata-rata target kinerja}} \right\} \times 100\%$$

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber dayasebesar 6.2%.

Upaya peningkatan Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun berikutnya adalah :

3. Inovasi dijadikan sebagai pola pemecahan masalah;
4. Evaluasi komitmen kinerja inovasi;
5. Manajemen inovasi; dan
6. Keberlanjutan inovasi.

**g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.**

Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

- l. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, Kegiatan terdiri dari :
  1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, Sub Kegiatan :
    - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan;

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah sebesar Rp.5.674.500,00 atau 93,79% dari total anggaran sebesar Rp. 6.050.000,00, sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 6,21%.



#### SASARAN STRATEGIS 4

**Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari dengan Indikator Kinerja:**

- Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik
- Angka Kemiskinan Ekstrim
- Prevalensi Stunting (Eppgbm)

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari terdiri atas 3 (tiga) indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik
2. Angka Kemiskinan Ekstrim
3. Prevalensi Stunting (Eppgbm)

#### a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.7 dibawah ini:

Tabel 3.17

Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja  
Sasaran Strategis Meningkatkan Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan  
Pembinaan Pemerintahan Nagari Tahun 2024

No	Sasaran	IndikatorKinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik	%	75%	70%	93.33
		Angka Kemiskinan Ekstrim	%	0%	0%	100
		Prevalensi Stunting (Eppgbm)	%	5%	5.52%	1.10
<b>Rata-ratacapaian(%)</b>						<b>64.81</b>

Sumber: Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2026



Dari Tabel 3.7 diatas dapat dijelaskan bahwa.

1. Realisasi capaian indikator kinerja Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik mencapai 70% dari target 75% atau tingkat capaiannya mencapai 99,33%.

Pengelolaan Keuangan Nagari adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Nagari.

Penyelenggaraan kewenangan Nagari berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari didanai oleh APB Nagari. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Nagari selain didanai oleh APB Nagari, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Penyelenggaraan kewenangan Nagari yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan Nagari yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Seluruh pendapatan Nagari diterima dan disalurkan melalui rekening kas Nagari dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Nagari. Pencairan dana dalam rekening kas Nagari ditandatangani oleh kepala Nagari dan Bendahara Nagari. Pengelolaan keuangan Nagari meliputi:

- a) perencanaan;
- b) pelaksanaan;
- c) penatausahaan;
- d) pelaporan; dan
- e) pertanggungjawaban.



Wali Nagari adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Nagari. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Nagari, Wali Nagari menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Nagari.

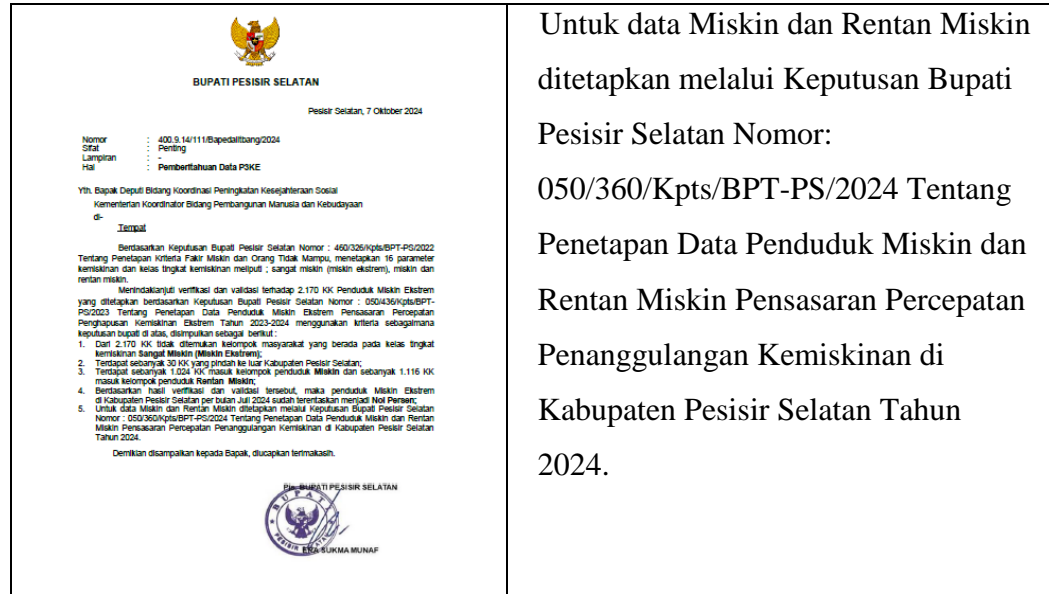
Pengelolaan keuangan Nagari dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pengalokasian Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pemerintah mengalokasikan Dana Nagari dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Ketentuan mengenai pengalokasian Dana Nagari diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah.

Suatu Nagari bisa dikatakan pengelola keuangannya baik, apabila telah merealisasikan anggaran mencapai diatas 90% lebih. Hal tersebut dapat diketahui pada realisasi anggaran per Nagari yang dapat dilihat melalui aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES) yang ada di nagari.

2. Realisasi capaian indikator kinerja Angka Kemiskinan Ekstrem mencapai 0% dari target 0% atau tingkat capaiannya mencapai 100%.

Angka Kemiskinan Ekstrem merupakan penilaian terhadap Hasil verifikasi dan validasi terhadap 2.170 KK Penduduk Miskin Ekstrem yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 050/436/Kpts/BPT-PS/2023 Tentang Penetapan Data Penduduk Miskin Ekstrem Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023-2024.





Gambar 3.10: SK Bupati Pemberitahuan Data P3KE 2024

3. Realisasi capaian indikator Prevalensi Stunting (Eppgbm) mencapai 5.25% dari target 5% atau tingkat capaiannya mencapai 1,10%.

Prevalensi Stunting merupakan presentase dari jumlah balita stunting dibagi dengan jumlah balita diukur dikali 100, data stunting ini didapatkan dari laporan Puskesmas Tanjung Makmur Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan

NO	Masalah gizi							
	Persentase balita stunting (pendek dan		Persentase balita wasting (gizi		Persentase balita overweight		Persentase balita underweight	
	Rerata jumlah balita stunting	%	Rerata jumlah balita wasting	%	Rerata jumlah balita overweight	%	Rerata jumlah balita underweight	%
	[19]	[20]	[21]	[22]	[23]	[24]	[25]	[26]
1	7	4.09	3	1.75	5	2.92	9	5.26
2	7	6.93	5	4.95	4	3.96	9	8.91
3	9	6.98	3	2.33	5	3.88	9	6.98
4	7	5	3	2.14	6	4.29	7	5
5	6	4.44	4	2.96	4	2.96	8	5.93
6	7	5.83	5	4.17	7	5.83	12	10
7	5	8.33	4	6.67	3	5	9	15
8	5	6.1	1	1.22	2	2.44	3	3.66
9	4	3.36	4	3.36	2	1.68	7	5.88
10	9	6.52	2	1.45	3	2.17	9	6.52
<b>TOTAL</b>	<b>66</b>	<b>5.52</b>	<b>34</b>	<b>2.85</b>	<b>41</b>	<b>3.43</b>	<b>82</b>	<b>6.86</b>

Gambar 3.11: Laporan Puskesmas Tanjung Makmur 2025



**b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.**

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik, Angka Kemiskinan Ekstrim, Prevalensi Stunting (Eppgbm) Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.8 dibawah ini :

**Tabel 3.18**

Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja  
Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1.	Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik	%	70%	75%	75%	70%	70%	70%	100%	93.33%	93.33%
2.	Angka Kemiskinan Ekstrim	%	-	0%	0%	-	0%	0%	-	100%	100%
3.	Prevalensi Stunting (Eppgbm)	%	-	5,20%	5%	-	5,10%	5,25%	-	1.02%	0,90%

Sumber: Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2026

Dari Tabel 3.8 diatas dapat dijelaskan bahwa:

1. Realisasi Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik Tahun 2025 sama dengan tahun Tahun 2024 yaitu sebesar 70%.
2. Realisasi Angka Kemiskinan Ekstrim Tahun 2024 0% dengan capaian kinerja 100%, untuk tahun 2023 dan 2024 tidak ada target dan realisasi yang dicapai.
3. Realisasi Prevalensi Stunting (Eppgbm) Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 5.52% dengan capaian kinerja 1,10%, untuk tahun 2023 tidak ada target dan realisasi yang dicapai.



**c. Membandingkan Realisasi Indikator Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.**

Perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik, Angka Kemiskinan Ekstrim, Prevalensi Stunting (Eppgbm) Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.9 dibawah ini:

Tabel 3.19  
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target  
Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik	75%	70%	93.33	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)
2.	Angka Kemiskinan Ekstrim	0%	0%	100	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)
3.	Prevalensi Stunting (Eppgbm)	5.52%	5%	0.90	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

Sumber: Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

**d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional.**

Perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik, Angka Kemiskinan Ekstrim, Prevalensi Stunting (Eppgbm) Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dengan provinsi dan nasional, tidak dapat dibandingkan karena merupakan target spesifik pada Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.



**e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.**

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik, Angka Kemiskinan Ekstrim, Prevalensi Stunting (Eppgbm) Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.10 dibawah ini:

Tabel 3.20  
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik	Persen	75%	70%	93.33	- Tersedianya data digital di pemerintahan Nagari. - Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Nagari	- Meningkatkan SDM Pemerintah Nagari - Mengikut sertakan masyarakat dalam pembangunan Nagari
		Angka Kemiskinan Ekstrim	Persen	0%	0%	100	- Kurangnya Akses Terhadap Pelayanan Dasar. - Belum maksimal Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Miskin.	- Meningkatkan Akses Terhadap Pelayanan Dasar. - Meningkatkan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Miskin.
		Prevalensi Stunting (Eppgbm)	Persen	5%	5.52%	0.90	- Kurangnya Akses ke Nutrisi yang Cukup dan Seimbang - Kurangnya Pendidikan dan Kesadaran tentang Gizi - Keterbatasan Akses Layanan Kesehatan - Masalah Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan	- Meningkatkan Akses dan Kualitas Gizi - Pendidikan Gizi dan Kesadaran Masyarakat - Peningkatan Layanan Kesehatan Ibu dan Anak - Perbaikan Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan

Sumber :Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2026



**f. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.21

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp.)			Tingkat Efisiensi Sumber Daya(%)
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik	75%	70%	93.33	5.800.000	4.970.000	85,69	8.2
		Angka Kemiskinan Ekstrim	0%	0%	100	48.605.000	47.109.000	96,92	12.3
		Prevalensi Stunting (Eppgbm)	5%	5.52%	0.90				

Sumber: Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2026

Perhitungan Tingkat Efisiensi sumber daya diperoleh dari rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 1 - \left\{ \frac{\text{realisasi anggaran / rata-rata realisasi kinerja}}{\text{jumlah anggaran / rata-rata target kinerja}} \right\} \times 100\%$$

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya pada indikator kinerja Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik sebesar 8.2%.

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya pada indikator kinerja Angka Kemiskinan Ekstrim dan Prevalensi Stunting (Eppgbm) sebesar 12.3%.

**g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.**

Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :





- I. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa, Kegiatan terdiri dari :
  1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Sub Kegiatan :
    - a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa;
- II. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Kegiatan terdiri dari:
  1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, Sub Kegiatan :
    - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
    - b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik adalah sebesar Rp.4.970.000,00 atau 85,69% dari total anggaran sebesar Rp. 5.800.000,00, sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 14,31%.

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Angka Kemiskinan Ekstrim dan Prevalensi Stunting (Eppgbm) Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 47.109.000,00 atau 96,92% dari total anggaran sebesar Rp. 48.605.000,00, sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 3,08%.

## ASARAN STRATEGIS 5

Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase Konflik Yang Diselesaikan.

### a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.7 dibawah ini:



Tabel 3.22

Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja  
Sasaran Strategis Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat  
Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Konflik Yang Diselesaikan	%	82	60	73,17
<b>Rata-rata capaian(%)</b>						<b>73,17</b>

Sumber: Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2026

Dari Tabel 3.7 diatas dapat dijelaskan bahwa.

1. Realisasi capaian indikator kinerja Persentase Konflik Yang Diselesaikan mencapai 60% dari target 82% atau tingkat capaiannya mencapai 73,17%.

Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban umum bahwa penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat, menjadi urusan wajib yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh elemen masyarakat dan dijalankan sesuai dengan ketentuan perundangundangan, budaya, serta tata nilai kehidupan masyarakat.

Ketentraman dan Ketertiban Umum suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, tentram, tertib, dan teratur.

Penyelenggaraan ketertiban umum merupakan salah satu urusan pemerintah konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten /kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan manifestasi dari hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sebagai instrumen regulasi yang berfungsi untuk mengendalikan dan mengarahkan dinamika sosial masyarakat, pemerintah daerah berkewajiban



menciptakan suatu perangkat kebijakan yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Fenomena yang secara nyata terjadi dalam masyarakat memerlukan perhatian yang khusus, terutama mengenai pertentangan kepentingan, baik vertikal antara pemerintah daerah dengan masyarakat, maupun kepentingan horizontal antara masyarakat dengan masyarakat.

Jumlah gangguan trantibum yang dilaporkan oleh masyarakat Kecamatan Silaut Tahun 2025 sebanyak 10, 6 kasus dan telah diselesaikan dengan baik dan 4 kasus dalam proses penyelesaian.

**b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.**

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Persentase Konflik Yang Diselesaikan Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.8 dibawah ini :

**Tabel 3.23**

Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja  
Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1.	Persentase Konflik Yang Diselesaikan	%	80%	80%	82%	80%	80%	60%	100	100	73,17%

Sumber: Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2026

Dari Tabel 3.8 diatas dapat dijelaskan bahwa Realisasi Persentase Konflik yang Diselesaikan Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan mengalami penurunan dari 80% Tahun 2024 menjadi sebesar 73,17% Tahun 2025.

**c. Membandingkan Realisasi Indikator Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.**

Perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Konflik yang Diselesaikan Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dengan target jangka



menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.9 dibawah ini:

Tabel 3.24  
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target  
Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Persentase Konflik Yang Diselesaikan	60%	82%	73,17	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

Sumber: Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2026

**d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional.**

Perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Konflik yang Diselesaikan Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dengan provinsi dan nasional, tidak dapat dibandingkan karena merupakan target spesifik pada Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

**e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.**

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja Persentase Konflik yang Diselesaikan Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.10 dibawah ini:

Tabel 3.25  
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)
1	Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Konflik Yang Diselesaikan	Persen	82%	60%	73,17	Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban.	Memperkuat peran siskamling dan pemangku adat dalam pencegahan penyakit masyarakat dan kenakalan remaja

Sumber :Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2026



**f. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.26

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp.)			Tingkat Efisiensi Sumber Daya(%)
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
1	Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Konflik Yang Diselesaikan	82%	60%	73,17	37.035.000	36.845.000	99,51	-36

Sumber: Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2026

Perhitungan Tingkat Efisiensi sumber daya diperoleh dari rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 1 - \left\{ \frac{\text{realisasi anggaran / rata-rata realisasi kinerja}}{\text{jumlah anggaran / rata-rata target kinerja}} \right\} \times 100\%$$

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya pada indikator kinerja Persentase Konflik yang Diselesaikan sebesar -36%.

**g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.**

Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

- l. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kegiatan terdiri dari:
  1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Sub Kegiatan :
    - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan;





- II. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Kegiatan terdiri dari:
1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, Sub Kegiatan :
    - a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa;
    - b. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Persentase Konflik yang Diselesaikan Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 36.845.000,00 atau 99,51% dari total anggaran sebesar Rp. 37.035.000,00, sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 0,49%.

### 3.4. REALISASI ANGGARAN

Anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian 5 (lima) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Silaut dengan Bupati Pesisir Selatan Tahun 2023, tercantum pada tabel 3.13 dibawah ini:

**Tabel 3.27**  
**Anggaran dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 yang Menunjang Sasaran Strategis**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PROGRAM	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIA N (%)	KET.
12	3		3		4	10	9		11
<b>KECAMATAN SILAUT</b>						<b>2.049.262.670</b>	<b>1.981.478.548</b>	<b>96,69</b>	
1. Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan yang Akuntabel dan Berkinerja	1. Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (81,0)	A (80,38)	99,23%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,951,772,670	1,886,880,048	96.68	
					Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12,127,550	10,411,550	85.85	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6,324,400	4,905,400	77.56	
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,803,150	5,506,150	94.88	





				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1,616,402,670</b>	<b>1,596,535,327</b>	<b>98.77</b>	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,561,607,670	1,544,140,327	98.88	
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	54,795,000	52,395,000	95.62	
				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>128,826,616</b>	<b>125,663,076</b>	<b>97.54</b>	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,807,524	1,807,524	100	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26,291,916	26,288,916	99.99	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5,977,176	5,139,736	85.99	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0	
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	11,550,000	11,550,000	100	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	83,200,000	80,876,900	97.21	
				<b>Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>49,516,000</b>	<b>48,772,560</b>	<b>98.5</b>	
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36,751,000	36,007,560	97.98	
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bagunan	12,765,000	12,765,000	100	
				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>41,682,807</b>	<b>38,929,635</b>	<b>93.39</b>	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4,532,000	4,515,000	99.62	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	37,150,807	34,414,635	92.63	
				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>103,217,027</b>	<b>66,567,900</b>	<b>64.49</b>	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	65,885,027	40,700,900	61.78	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7,600,000	4,235,000	55.72	
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29,732,000	21,632,000	72.76	





2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	2.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87	91.30	104,94%	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>6,050,000</b>	<b>5,674,500</b>	<b>93.79</b>					
					Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	6,050,000	5,674,500	93.79					
					Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6,050,000	5,674,500	93.79					
3. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	3.Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan.	92	92	100%	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>5,800,000</b>	<b>4,970,000</b>	<b>85.69</b>					
					Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5,800,000	4,970,000	85.69					
					Sub Kegiatan Fasilitas Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	2,680,000	1,850,000	69.03					
4. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	4.Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik	75%	70%	93,33%	Sub Kegiatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3,120,000	3,120,000	100					
					5.Angka Kemiskinan Ekstrim	0	0	100%	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>48,605,000</b>	<b>47,109,000</b>	<b>96.92</b>	
					6.Prevalensi Stunting (Eppgbm)	5%	5,52%	0,90%	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	48,605,000	47,109,000	96.92	
									Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9,450,000	8,944,000	94.65	
									Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	39,155,000	38,165,000	97.47	
5. Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat	7.Persentase Konflik Yang Diselesaikan	82%	60%	73,17%	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>5,085,000</b>	<b>5,085,000</b>	<b>100</b>					
					Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5,085,000	5,085,000	100					
					Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5,085,000	5,085,000	100					
					<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>31,950,000</b>	<b>31,760,000</b>	<b>99.41</b>					





					<b>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>31,950,000</b>	<b>31,760,000</b>	<b>99.41</b>	
					Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	29,415,000	29,225,000	99.35	
					Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2,535,000	2,535,000	100	

Sumber: Bagian Keuangan Tahun 2026

Dari tabel diatas dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Plafon anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 untuk menunjang pencapaian 5 (lima) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 sebesar Rp. **2.049.262.670,-** terealisasi sebesar Rp. **1.981.478.548,-** atau **96,69%**.

Artinya dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian 5 (lima) sasaran strategis terdapat sisa anggaran sebesar Rp.67.784.122,- atau 3,31% .

- b. Sisa anggaran sebesar Rp.67.784.122,- atau 3.31% mencerminkan kurang akuratnya perencanaan dan penganggaran program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan. Seharusnya sisa anggaran ini dapat dipergunakan untuk meningkatkan capaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.



## BAB IV PENUTUP

### 4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa kinerja pada Bab III, Capaian Kinerja Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian Sasaran dari 5 (lima) sasaran yang telah ditetapkan, rata-rata nilai capaian indikator kinerja adalah 81,65% dengan kategori **baik**, dengan nilai tertinggi adalah 104,94% yaitu pada sasaran Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah.
2. Capaian Indikator Kinerja Jika dilihat dari realisasi 7 (tujuh) indikator kinerja yang telah ditetapkan yaitu :
  - a. Nilai AKIP Perangkat Daerah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dengan target A (81,0). Capaian indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan adalah A (80,38) atau sebesar 99,23% dengan predikat **sangat baik**, Nilai AKIP Perangkat Daerah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan ini memakai nilai evaluasi Tahun 2024 dikarenakan Nilai AKIP Perangkat Daerah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 diperoleh dari nilai evaluasi laporan kinerja Tahun 2024 yang nilai ini baru bisa diperoleh sekitar pada bulan Maret Tahun 2025.
  - b. Nilai Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan target 87. Capaian indikator Nilai Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik adalah 91,30 atau sebesar 104,94% dengan predikat **sangat baik**.
  - c. Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan dengan target 92. Capaian indikator Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan Silaut adalah 92 atau sebesar 100% dengan predikat **sangat baik**.
  - d. Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik dengan target 75%. Capaian indikator Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik adalah 70% atau sebesar 99,33% dengan predikat **sangat baik**.





- e. Persentase Angka Kemiskinan Ekstrem dengan target 0%. Capaian indikator Persentase Angka Kemiskinan Ekstrem adalah 0% atau sebesar 100% dengan predikat **sangat baik**.
- f. Persentase Prevalensi Stunting (Eppgbm) dengan target 5%. Capaian indikator Persentase Angka Kemiskinan Ekstrem adalah 5.52% atau sebesar 0,90% dengan predikat **kurang baik**.
- g. Persentase Konflik Yang Diselesaikan dengan target 80%. Capaian indikator Persentase Angka Kemiskinan Ekstrem adalah 60% atau sebesar 73,17% dengan predikat **baik**.

Capaian rata-rata ke 7 (tujuh) indikator kinerja tersebut diatas adalah sebesar 81,65% dengan predikat **baik**.

Capaian Realisasi Anggaran dalam Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis Anggaran Belanja Daerah pada Kecamatan Silaut tahun 2025 yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis dialokasikan sebesar Rp.2.049.262.670,- terealisasi sebesar Rp1.981.478.548,- atau 96,69%.

## 4.2 SARAN

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka dilakukan upaya-upaya, antara lain:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi di internal Kecamatan Silaut yang melibatkan seluruh Pejabat Struktural di Kecamatan Silaut secara rutin dan berkala dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program-program pembangunan serta untuk mengantisipasi kendala-kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program pemerintah;
2. Melakukan pembinaan, pendidikan dan pelatihan bagi pegawai Kecamatan Silaut dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai agar pegawai dapat lebih cepat merespon kebutuhan yang ada di masyarakat;



3. Meningkatkan kerjasama dan peran serta *stakeholders* atau pemangku kepentingan baik dengan pemerintah daerah, instansi pemerintah lainnya, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta elemen masyarakat lainnya dalam melaksanakan program-program pembangunan Kecamatan Silaut agar Rencana Pembangunan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kecamatan Silaut.



Camat Silaut,

ARTIZEN, S.Sos.

Rembina / IV.a

NIP.197206051993031005